Journal of Sharia Economics
Vol. 8, No. 1, Oktober, 2026, pp. 349 –369
p-ISSN: 2655-2493 ; e-ISSN: 2655-2485
Website: http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Pengaruh Faktor Religiusitas, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Surya Dika Pratama[1], Mellya Embun Baining[2], Hareastoma[3]
[1,2,3] UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
*Corresponding author, email; suryadikapratama8@gmail.com, mellyaembunbaining@uinjambi.ac.id, hareastoma@uinjambi.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni 2025
Revised Juni 2025
Accepted Juni 2025
Available online
http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Keywords:
religiosity, accountability, transparency, *muzakki* intention, BAZNAS.

Turabian style in citing this article: [citation Heading]
Pengaruh Faktor Religiusitas, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur"*Journal of Sharia Economics 8*, No. 1, Oktober: 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of religiosity, accountability, and transparency in *zakat* (alms) management on the intention of *muzakki* (zakat payers) to pay *zakat* through the National Zakat Agency (*Badan Amil Zakat Nasional* – BAZNAS) of Tanjung Jabung Timur Regency, both partially and simultaneously. The study employs a quantitative approach using a survey method with 98 respondents. Data were analyzed using multiple linear regression with the aid of SPSS software (version 25). The results indicate that religiosity has a positive and significant influence on the *muzakki*'s intention to pay *zakat*, with a regression coefficient of 0.329 and a significance value of 0.002. Accountability also exerts a positive and significant influence, with a regression coefficient of 0.176 and a significance value of 0.016. Meanwhile, transparency shows a positive and significant influence, with a regression coefficient of 0.206 and a significance value of 0.001. Simultaneously, these three variables have a significant effect on the *muzakki*'s intention, as indicated by an F-value of 28.512 ($p < 0.001$). An Adjusted R-square value of 0.460 suggests that the model explains 46% of the variation in the *muzakki*'s intention, while the remaining 54% is influenced by factors outside the scope of this research model. This study underscores the importance of strengthening religiosity, accountability, and transparency as part of BAZNAS's strategy to increase public interest in distributing *zakat* through an official institution.

2026 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan menjadi salah satu isu penting dalam penyelenggaraan aktivitas organisasi, termasuk pada sektor pelayanan kesehatan. Rumah sakit memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi kegiatan operasionalnya juga menghasilkan limbah yang

berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan apabila tidak dikelola secara tepat. Salah satu jenis limbah yang memerlukan penanganan khusus adalah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang dapat berasal dari aktivitas pelayanan medis, laboratorium, farmasi, dan kegiatan penunjang lainnya. Pengelolaan limbah B3 tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab organisasi terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitasnya. Oleh karena itu, rumah sakit perlu mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem pengelolaan organisasi, termasuk melalui pencatatan dan pelaporan biaya lingkungan secara sistematis (Republik Indonesia, 2009; Republik Indonesia, 2021).

Dalam konteks tersebut, akuntansi lingkungan menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, menyajikan, dan mengungkapkan biaya yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan lingkungan. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya, mengendalikan biaya pengelolaan limbah, serta mendukung pengambilan keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan. Ikhsan (2008) menjelaskan bahwa akuntansi lingkungan berkaitan dengan identifikasi dan pengungkapan biaya lingkungan yang timbul akibat aktivitas organisasi. Dengan demikian, penerapan akuntansi lingkungan tidak semata-mata berfungsi sebagai mekanisme pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi terhadap dampak lingkungannya. Dalam pengelolaan rumah sakit, informasi biaya lingkungan yang teridentifikasi secara jelas menjadi penting karena pengelolaan limbah B3 membutuhkan pembiayaan yang berkelanjutan dan pengendalian yang memadai (Gray et al., 1996; Ikhsan, 2008).

Urgensi penerapan akuntansi lingkungan semakin relevan ketika dikaitkan dengan tanggung jawab sosial organisasi atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tanggung jawab sosial menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya diukur berdasarkan pencapaian tujuan finansial atau operasional, tetapi juga berdasarkan kemampuannya memperhatikan kepentingan masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan. Dalam konteks rumah sakit, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui upaya mencegah pencemaran, melindungi keselamatan pasien dan tenaga kesehatan, serta memastikan bahwa limbah yang dihasilkan ditangani sesuai ketentuan. Gray et al. (1996) menempatkan akuntansi dan pelaporan sosial serta lingkungan dalam kerangka pertanggungjawaban organisasi kepada para pemangku kepentingan. Sejalan dengan pandangan tersebut, pencatatan biaya pengelolaan limbah secara transparan dapat mendukung evaluasi terhadap komitmen rumah sakit dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Di Indonesia, tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis dan terpadu untuk mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan (Republik Indonesia, 2009). Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 mengatur pelaksanaan ketentuan kesehatan lingkungan, termasuk persyaratan kesehatan pada berbagai media dan fasilitas lingkungan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Kerangka regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan limbah rumah sakit perlu dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab menjaga lingkungan juga sejalan dengan pesan Al-Qur'an dalam Surah Al-Qashash ayat 77 yang melarang manusia berbuat kerusakan di bumi (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). Nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab tersebut memperkuat pemahaman bahwa pengelolaan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral sekaligus institusional.

Fenomena empiris yang menjadi perhatian dalam penelitian ini terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Provinsi Jambi. Berdasarkan data yang tercantum dalam dokumen penelitian, jumlah limbah B3 yang dikelola rumah sakit mengalami peningkatan selama periode 2022–2024. Pada 2022, jumlah limbah B3 tercatat sebesar 94.394 kg, kemudian meningkat menjadi 94.669 kg pada 2023, dan mencapai 100.190 kg pada 2024 (RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, 2022–2024). Pada periode yang sama, total biaya pengelolaan limbah juga meningkat, yaitu sebesar Rp1.019.304.800 pada 2022, Rp1.022.194.800 pada 2023, dan Rp1.076.786.400 pada 2024. Biaya tersebut mencakup komponen penanganan, transportasi, dan pengolahan limbah. Data ini memperlihatkan bahwa pengelolaan limbah B3 bukan hanya persoalan teknis lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya keuangan dan kebutuhan akan informasi biaya yang akurat.

Peningkatan volume limbah dan biaya pengelolaannya menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi bagaimana biaya lingkungan diidentifikasi dan disajikan dalam sistem akuntansi rumah sakit. Apabila biaya penanganan, transportasi, dan pengolahan limbah masih digabungkan dengan biaya operasional umum tanpa klasifikasi yang memadai, manajemen akan menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi total biaya lingkungan secara spesifik. Kondisi tersebut berpotensi membatasi kemampuan organisasi dalam menilai efektivitas pengeluaran, membandingkan perkembangan biaya dari tahun ke tahun, dan menentukan kebijakan pengelolaan limbah secara lebih tepat. Hansen dan Mowen (2009) menjelaskan pentingnya pengelompokan biaya kualitas lingkungan ke dalam biaya pencegahan, deteksi, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Kerangka klasifikasi ini dapat membantu organisasi memahami karakteristik biaya lingkungan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi manajerial. Meskipun demikian, penerapannya perlu disesuaikan dengan karakteristik kegiatan pelayanan kesehatan serta sistem pencatatan yang berlaku pada rumah sakit.

Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan pengeluaran untuk pengelolaan limbah belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa akuntansi lingkungan telah diterapkan secara menyeluruh. Evaluasi perlu dilakukan terhadap proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penyajian, dan pengungkapan biaya lingkungan, sekaligus keterkaitannya dengan pertanggungjawaban sosial rumah sakit. Kajian yang hanya menitikberatkan pada

jumlah limbah atau besarnya biaya belum cukup untuk menjelaskan bagaimana informasi biaya tersebut dimanfaatkan dalam pengendalian manajemen dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Gray et al. (1996) menekankan pentingnya pelaporan sosial dan lingkungan sebagai bagian dari akuntabilitas organisasi. Oleh sebab itu, penelitian ini memandang penting analisis yang menghubungkan praktik akuntansi lingkungan dengan pengelolaan limbah B3 dan tanggung jawab sosial organisasi dalam satu kerangka kajian.

Sejumlah penelitian dan literatur mengenai akuntansi lingkungan telah membahas pengelolaan biaya lingkungan pada perusahaan maupun organisasi pelayanan kesehatan. Gray et al. (1996), misalnya, membahas perkembangan akuntansi dan pelaporan sosial serta lingkungan dalam kaitannya dengan akuntabilitas organisasi. Sementara itu, Ikhsan (2008) menguraikan pentingnya akuntansi lingkungan untuk meningkatkan relevansi informasi biaya dan mendukung pengelolaan dampak lingkungan. Namun, berdasarkan fokus dan data yang digunakan dalam penelitian ini, masih diperlukan kajian kontekstual mengenai penerapan akuntansi lingkungan pada pengelolaan limbah B3 di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, khususnya dengan memperhatikan perkembangan volume limbah dan biaya pengelolaan selama 2022–2024. Kesenjangan kajian yang hendak dijawab bukan sekadar mengenai ada atau tidaknya biaya pengelolaan limbah, melainkan bagaimana biaya tersebut diperlakukan dalam sistem akuntansi serta sejauh mana praktik tersebut mendukung pertanggungjawaban sosial dan lingkungan rumah sakit. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang lebih terarah mengenai hubungan antara pencatatan biaya lingkungan, pengelolaan limbah B3, dan akuntabilitas organisasi di sektor pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah B3 di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, menjelaskan pengelolaan limbah sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, serta mengevaluasi klasifikasi dan pelaporan biaya pengelolaan limbah berdasarkan konsep akuntansi lingkungan. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi rumah sakit dalam penerapan akuntansi lingkungan. Secara teoretis, penelitian diharapkan memperkaya kajian akuntansi lingkungan pada organisasi pelayanan kesehatan. Secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pihak rumah sakit dalam meningkatkan transparansi biaya, efektivitas pengelolaan limbah B3, dan kualitas pertanggungjawaban sosial serta lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan akuntansi lingkungan sebagai instrumen yang menghubungkan pengelolaan biaya, kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan, dan komitmen organisasi terhadap keberlanjutan.

KAJIAN TEORI

1. Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan merupakan bagian dari pengembangan akuntansi yang mengintegrasikan informasi keuangan dengan aspek lingkungan dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Akuntansi ini berfokus pada identifikasi, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penyajian, dan pengungkapan biaya yang berkaitan dengan dampak lingkungan akibat aktivitas operasional. Menurut Ikhsan (2008), akuntansi lingkungan berkaitan dengan pengungkapan biaya lingkungan yang muncul sebagai konsekuensi aktivitas organisasi. Dengan demikian, akuntansi lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga menjadi sarana untuk memahami konsekuensi ekonomi dari pengelolaan lingkungan.

Penerapan akuntansi lingkungan memungkinkan organisasi mengidentifikasi biaya yang sebelumnya tercatat sebagai bagian dari biaya operasional umum. Informasi tersebut penting karena biaya lingkungan dapat mencakup pengeluaran untuk pencegahan pencemaran, penanganan limbah, transportasi, pengolahan, pemantauan, dan pemulihan lingkungan. Identifikasi biaya secara terpisah membantu manajemen memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai sumber daya yang digunakan untuk memenuhi tanggung jawab lingkungan. Lako (2018) menekankan pentingnya integrasi informasi keuangan, sosial, dan lingkungan dalam pengembangan akuntansi hijau. Dalam konteks rumah sakit, penerapan akuntansi lingkungan dapat mendukung pengendalian biaya pengelolaan limbah B3 sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya.

Secara operasional, penerapan akuntansi lingkungan dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu pengakuan biaya lingkungan, pengukuran biaya, pencatatan transaksi, pengklasifikasian biaya, penyajian informasi, dan pengungkapan dalam laporan yang relevan. Pengakuan berkaitan dengan penentuan kapan suatu pengeluaran diidentifikasi sebagai biaya lingkungan. Pengukuran berhubungan dengan penetapan nilai moneter pengeluaran tersebut, sedangkan pencatatan dan klasifikasi bertujuan memastikan bahwa transaksi dicatat secara sistematis sesuai karakteristiknya. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan memungkinkan informasi tersebut dipahami oleh manajemen dan pemangku kepentingan. Aspek-aspek ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana biaya pengelolaan limbah B3 telah diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi (Ikhsan, 2008; Lako, 2018).

2. Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan upaya organisasi mencegah, mengendalikan, menangani, dan mengurangi dampak negatif aktivitas operasional terhadap lingkungan. Biaya tersebut tidak terbatas pada pengeluaran yang secara langsung terlihat dalam proses pengolahan limbah, tetapi juga dapat mencakup biaya pencegahan, pemantauan, pengendalian, dan penanganan konsekuensi lingkungan. Hansen dan Mowen (2009) menjelaskan

bahwa biaya kualitas lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Pengelompokan ini membantu organisasi memahami tujuan pengeluaran serta menilai efektivitas kebijakan pengelolaan lingkungan.

Biaya pencegahan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah timbulnya pencemaran atau kerusakan lingkungan, misalnya melalui pelatihan pengelolaan limbah, perencanaan prosedur, dan pengadaan sarana pencegahan. Biaya deteksi berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan pemantauan untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Biaya kegagalan internal muncul ketika limbah atau dampak lingkungan harus ditangani sebelum menimbulkan dampak di luar organisasi. Sementara itu, biaya kegagalan eksternal berkaitan dengan dampak lingkungan yang telah terjadi di luar organisasi dan memerlukan tindakan penanganan atau pemulihan. Klasifikasi tersebut dapat digunakan sebagai kerangka analisis, tetapi penerapannya pada rumah sakit perlu mempertimbangkan karakteristik pengeluaran, dokumen transaksi, dan ketentuan pengelolaan limbah yang berlaku (Hansen & Mowen, 2009).

Dalam pengelolaan limbah B3, biaya lingkungan menjadi komponen penting karena rumah sakit membutuhkan sumber daya untuk menangani limbah sejak dihasilkan hingga diserahkan kepada pengolah yang memenuhi persyaratan. Biaya tersebut dapat meliputi penanganan, pengemasan, penyimpanan sementara, transportasi, dan pengolahan limbah sesuai prosedur yang berlaku. Pencatatan biaya secara terstruktur membantu rumah sakit mengidentifikasi besarnya pengeluaran, mengevaluasi perubahan biaya dari tahun ke tahun, dan mempertimbangkan efisiensi pengelolaan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kepatuhan. Oleh karena itu, analisis biaya lingkungan pada penelitian ini diarahkan untuk memahami hubungan antara perkembangan volume limbah B3, komponen biaya pengelolaan, dan kualitas informasi akuntansi yang tersedia.

3. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan limbah yang memiliki karakteristik atau kandungan tertentu sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Pada sektor pelayanan kesehatan, limbah yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai aktivitas medis dan penunjang, sehingga pengelolaannya membutuhkan prosedur yang sesuai dengan karakteristik limbah. Pengelolaan limbah tidak cukup dilakukan melalui pembuangan akhir, tetapi harus memperhatikan tahapan pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan sesuai ketentuan yang berlaku. Kerangka perlindungan lingkungan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sedangkan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3 juga berkaitan dengan peraturan pelaksana di bidang lingkungan hidup (Republik Indonesia, 2009, 2021).

Pengelolaan limbah B3 pada rumah sakit memiliki dimensi teknis, kesehatan, lingkungan, dan keuangan. Dari sisi teknis, rumah sakit harus memastikan limbah

ditangani sesuai karakteristiknya. Dari sisi kesehatan dan lingkungan, pengelolaan yang tepat diperlukan untuk mengurangi risiko paparan dan pencemaran. Sementara itu, dari sisi keuangan, setiap tahapan pengelolaan menimbulkan konsekuensi biaya yang perlu direncanakan dan dikendalikan. Dengan demikian, pengelolaan limbah B3 berkaitan erat dengan akuntansi lingkungan karena setiap aktivitas yang memerlukan sumber daya keuangan perlu didukung pencatatan yang dapat ditelusuri dan dievaluasi.

Dalam penelitian ini, pengelolaan limbah B3 dianalisis dengan memperhatikan perkembangan volume limbah serta biaya penanganan, transportasi, dan pengolahannya di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi selama 2022–2024. Data tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan perubahan kebutuhan pengelolaan limbah dan implikasinya terhadap biaya lingkungan. Namun, peningkatan volume maupun biaya tidak dapat secara otomatis diartikan sebagai penurunan kinerja lingkungan. Penilaian yang lebih menyeluruh perlu mempertimbangkan faktor aktivitas pelayanan, karakteristik limbah, kepatuhan terhadap prosedur, serta efektivitas sistem pencatatan dan pelaporan biaya.

4. Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep yang menekankan tanggung jawab organisasi atas dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat serta lingkungan. Dalam perspektif akuntabilitas, organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak yang menyediakan sumber daya keuangan, tetapi juga kepada kelompok yang terkena dampak aktivitasnya. Gray et al. (1996) membahas akuntansi dan pelaporan sosial serta lingkungan sebagai bagian dari perkembangan pertanggungjawaban organisasi. Perspektif ini menunjukkan bahwa transparansi informasi sosial dan lingkungan merupakan unsur penting dalam membangun hubungan yang bertanggung jawab antara organisasi dan pemangku kepentingan.

Pada organisasi pelayanan kesehatan, pertanggungjawaban sosial memiliki karakteristik yang berkaitan langsung dengan perlindungan kesehatan masyarakat dan pengelolaan dampak operasional. Rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan, tetapi pada saat yang sama perlu mengendalikan risiko lingkungan yang timbul dari aktivitasnya. Pengelolaan limbah B3 yang sesuai ketentuan, penyediaan informasi biaya yang memadai, serta pelaksanaan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, tanggung jawab sosial rumah sakit tidak hanya tercermin dalam pelayanan kepada pasien, tetapi juga dalam cara rumah sakit mengelola konsekuensi lingkungan dari kegiatan operasionalnya.

Akuntansi lingkungan mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial melalui penyediaan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya dan komitmen organisasi terhadap perlindungan lingkungan. Informasi biaya yang jelas membantu manajemen menunjukkan bahwa pengelolaan limbah

direncanakan dan dilaksanakan secara terukur. Pada saat yang sama, pencatatan dan pelaporan yang memadai memperkuat akuntabilitas internal serta menyediakan dasar informasi bagi pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu, hubungan antara akuntansi lingkungan dan pertanggungjawaban sosial dalam penelitian ini dianalisis melalui keterkaitan pencatatan biaya pengelolaan limbah B3, pelaksanaan tanggung jawab lingkungan, dan transparansi informasi organisasi.

5. Akuntansi Lingkungan dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, pengelolaan lingkungan berkaitan dengan nilai amanah, keadilan, kemaslahatan, dan larangan melakukan kerusakan di bumi. Manusia memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara bijaksana dan menghindari tindakan yang menimbulkan kerugian bagi makhluk hidup maupun lingkungan. Prinsip tersebut sejalan dengan Surah Al-Qashash ayat 77 yang memuat larangan berbuat kerusakan di bumi dan Surah Ar-Rum ayat 41 yang menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan laut berkaitan dengan perbuatan manusia (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). Kedua ayat tersebut memberikan landasan etis bahwa aktivitas ekonomi dan kelembagaan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan.

Nilai amanah dalam akuntansi lingkungan dapat dipahami sebagai kewajiban organisasi untuk mengelola sumber daya dan melaporkan informasi secara jujur serta bertanggung jawab. Prinsip keadilan menuntut agar pengelolaan lingkungan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat yang berpotensi terkena dampak. Sementara itu, prinsip kemaslahatan menekankan pentingnya keputusan yang memberikan manfaat dan mengurangi risiko kerugian bagi masyarakat. Dalam konteks rumah sakit, nilai-nilai tersebut relevan dengan kewajiban mengelola limbah B3 secara tepat, mengendalikan biaya lingkungan, serta menjaga agar aktivitas pelayanan kesehatan tidak menimbulkan dampak yang dapat dihindari terhadap lingkungan sekitar.

Dengan demikian, perspektif Islam memberikan dimensi etis terhadap penerapan akuntansi lingkungan. Akuntansi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dan konsekuensi kegiatan organisasi. Dalam penelitian ini, perspektif Islam menjadi landasan normatif untuk memahami pentingnya kejujuran, amanah, dan tanggung jawab lingkungan, sedangkan penilaian empiris terhadap penerapan akuntansi lingkungan tetap dilakukan berdasarkan data dan dokumen yang tersedia.

6. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian teoretis tersebut, penerapan akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah B3 dapat dipahami sebagai hubungan antara aktivitas pengelolaan limbah, biaya yang timbul, sistem pencatatan akuntansi, dan pertanggungjawaban sosial organisasi. Pengelolaan limbah menghasilkan kebutuhan pembiayaan untuk penanganan, transportasi, dan pengolahan. Biaya tersebut

selanjutnya perlu diidentifikasi, diukur, dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan secara memadai agar dapat digunakan dalam evaluasi manajemen. Informasi yang dihasilkan menjadi salah satu dasar untuk menilai transparansi biaya dan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan rumah sakit.

Dalam konteks penelitian pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, kerangka konseptual diarahkan pada tiga fokus utama. Pertama, penerapan akuntansi lingkungan, yang meliputi perlakuan dan pelaporan biaya pengelolaan limbah B3. Kedua, pengelolaan limbah B3, yang meliputi perkembangan volume dan komponen biaya penanganan, transportasi, serta pengolahan selama 2022–2024. Ketiga, pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, yang ditelaah melalui keterkaitan antara praktik pengelolaan limbah, kepatuhan terhadap ketentuan yang relevan, dan akuntabilitas informasi biaya. Ketiga fokus tersebut digunakan untuk menjelaskan praktik akuntansi lingkungan pada objek penelitian serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi penerapannya.

Kerangka ini tidak mengasumsikan bahwa peningkatan biaya selalu menunjukkan pengelolaan yang buruk atau bahwa pencatatan biaya secara terpisah dengan sendirinya membuktikan kinerja lingkungan yang baik. Kesimpulan mengenai penerapan akuntansi lingkungan perlu didasarkan pada pemeriksaan dokumen keuangan, bukti pengeluaran, prosedur pengelolaan limbah, dan keterangan informan yang relevan. Dengan pendekatan tersebut, analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang proporsional mengenai praktik akuntansi lingkungan sebagai bagian dari pertanggungjawaban sosial RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dan lingkungan rumah sakit. Analisis difokuskan pada proses identifikasi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan biaya lingkungan, serta kesesuaiannya dengan praktik pengelolaan limbah dan ketentuan yang relevan. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian berupaya menggambarkan praktik yang berlangsung di lapangan berdasarkan informasi dari informan dan dokumen pendukung, bukan menguji hipotesis statistik.

Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Provinsi Jambi, yang beralamat di Jalan Letjen Suprapto No. 31, Telanaipura, Kota Jambi. Objek penelitian adalah penerapan akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah B3, terutama berkaitan dengan biaya penanganan, transportasi, dan pengolahan limbah selama periode 2022–2024. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang memahami pengelolaan limbah dan pencatatan keuangan rumah sakit, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen yang relevan, seperti laporan

keuangan, catatan biaya pengelolaan limbah, informasi mengenai jenis dan volume limbah, prosedur operasional, serta peraturan terkait pengelolaan lingkungan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pengelolaan limbah B3 di lingkungan rumah sakit. Wawancara dilakukan dengan informan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah dan administrasi keuangan untuk menggali informasi mengenai prosedur pengelolaan, perlakuan akuntansi atas biaya lingkungan, serta kendala yang dihadapi. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen keuangan dan dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan volume limbah, biaya penanganan, transportasi, dan pengolahan. Penggunaan ketiga teknik tersebut memungkinkan peneliti membandingkan informasi dari berbagai sumber sehingga gambaran yang diperoleh tidak hanya bergantung pada keterangan lisan.

Analisis data menggunakan metode deskriptif komparatif. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan biaya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3. Tahap kedua adalah menganalisis perlakuan akuntansi lingkungan, meliputi identifikasi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan biaya, berdasarkan dokumen serta keterangan informan. Tahap ketiga dilakukan dengan membandingkan praktik yang ditemukan di rumah sakit dengan konsep akuntansi lingkungan dan ketentuan yang relevan. Data biaya tahun 2022–2024 juga ditelaah untuk menggambarkan perubahan volume limbah dan pengeluaran pengelolaannya. Selanjutnya, seluruh temuan diinterpretasikan untuk menjelaskan penerapan akuntansi lingkungan, kaitannya dengan pertanggungjawaban sosial, serta kendala yang memengaruhi pelaksanaannya.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu apabila diperlukan, dan *member check*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pihak keuangan, pengelola limbah atau sanitasi lingkungan, dan informan lain yang relevan. Triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan observasi serta dokumen pendukung. Triangulasi waktu digunakan untuk memeriksa konsistensi informasi melalui pengumpulan data pada waktu yang berbeda apabila dibutuhkan. Sementara itu, *member check* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali informasi atau interpretasi hasil wawancara kepada informan terkait. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas temuan dan memastikan bahwa kesimpulan penelitian sesuai dengan data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Limbah B3 dan Perkembangan Biaya Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi telah melaksanakan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) melalui tahapan pemilahan, pengumpulan, penyimpanan sementara, pengangkutan, dan pengolahan limbah. Rumah sakit juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam

proses pengangkutan dan pengolahan limbah. Jenis limbah yang diidentifikasi meliputi limbah infeksius, patologis, benda tajam, farmasi, sitotoksik, kimiawi, radioaktif, dan kontainer bertekanan. Karakteristik limbah tersebut menuntut penanganan yang sesuai karena berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan dan lingkungan apabila tidak dikelola secara tepat.

Pengelolaan limbah tersebut menimbulkan konsekuensi keuangan yang perlu direncanakan dan dipertanggungjawabkan. Berdasarkan data dalam skripsi, volume limbah B3 dan biaya pengelolaannya selama 2022–2024 disajikan sebagai berikut.

Tahun	Volume limbah B3 (kg)	Biaya penanganan (Rp)	Biaya transportasi (Rp)	Biaya pengolahan (Rp)	Total biaya (Rp)
2022	94.394	257.588.800	151.697.500	610.018.500	1.019.304.800
2023	94.669	258.317.000	152.128.800	611.749.000	1.022.194.800
2024	100.190	271.967.300	160.291.600	644.527.500	1.076.786.400
Total	**289.253**	**787.873.100**	**464.117.900**	**1.866.295.000**	**3.118.286.000**

Sumber: Data RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebagaimana disajikan dalam skripsi Rizkana Elnafia, diolah kembali.

Tabel diatas memperlihatkan bahwa volume limbah B3 meningkat dari 94.394 kg pada 2022 menjadi 94.669 kg pada 2023, kemudian mencapai 100.190 kg pada 2024. Secara keseluruhan, volume limbah selama tiga tahun mencapai 289.253 kg. Pada periode yang sama, total biaya pengelolaan mencapai Rp3.118.286.000. Biaya tersebut terdiri atas biaya penanganan sebesar Rp787.873.100, biaya transportasi sebesar Rp464.117.900, dan biaya pengolahan sebesar Rp1.866.295.000. Dengan demikian, biaya pengolahan menjadi komponen pengeluaran terbesar dalam pengelolaan limbah B3 selama periode penelitian.

Total biaya pengelolaan limbah meningkat dari Rp1.019.304.800 pada 2022 menjadi Rp1.022.194.800 pada 2023, kemudian meningkat menjadi Rp1.076.786.400 pada 2024. Kenaikan biaya dari 2022 ke 2023 sebesar Rp2.890.000 atau sekitar 0,28%, sedangkan kenaikan dari 2023 ke 2024 mencapai Rp54.591.600 atau sekitar 5,34%. Perkembangan ini menunjukkan bertambahnya kebutuhan anggaran untuk pengelolaan limbah B3. Meskipun demikian, peningkatan biaya tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai penurunan efisiensi karena evaluasi yang lebih menyeluruh perlu mempertimbangkan perubahan volume limbah, tarif jasa pengelolaan, kebutuhan teknis, dan standar keselamatan lingkungan.

Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya akuntansi lingkungan dalam menyediakan informasi yang terstruktur mengenai biaya pengelolaan limbah. Ikhsan (2008) menjelaskan bahwa akuntansi lingkungan berkaitan dengan identifikasi dan pengungkapan biaya yang timbul akibat aktivitas organisasi terhadap lingkungan. Dalam konteks rumah sakit, informasi biaya yang terperinci dapat membantu manajemen mengetahui komponen pengeluaran yang paling besar, menyusun

anggaran, dan mengevaluasi kebutuhan pengelolaan limbah pada periode berikutnya. Oleh karena itu, data volume limbah dan biaya pengelolaannya perlu diperlakukan sebagai informasi yang saling melengkapi dalam proses evaluasi manajemen.

Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan

Identifikasi biaya lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit telah mengenali jenis limbah B3 yang dihasilkan dari aktivitas pelayanan kesehatan serta mengidentifikasi pengeluaran yang berkaitan dengan penanganan, transportasi, dan pengolahan limbah. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui karakteristik limbah yang memerlukan perlakuan khusus dan menentukan kebutuhan sumber daya dalam pengelolaannya. Praktik ini menunjukkan bahwa aspek lingkungan telah menjadi bagian dari aktivitas operasional rumah sakit.

Dalam konsep akuntansi lingkungan, identifikasi biaya merupakan tahap awal untuk memastikan bahwa pengeluaran yang berhubungan dengan lingkungan dapat dikenali secara tepat. Biaya lingkungan tidak seharusnya dipahami hanya sebagai pengeluaran pengolahan limbah, tetapi juga dapat mencakup kegiatan pencegahan, pemantauan, dan pengendalian dampak lingkungan. Oleh sebab itu, identifikasi yang lebih terstruktur diperlukan agar seluruh pengeluaran yang relevan dapat dipetakan sesuai fungsi dan tujuannya (Ikhsan, 2008).

Berdasarkan temuan tersebut, identifikasi biaya lingkungan di RSUD Raden Mattaher telah berjalan pada tingkat pengenalan aktivitas dan komponen pengeluaran. Namun, identifikasi tersebut perlu diperkuat melalui pengelompokan biaya yang konsisten dan terdokumentasi. Penguatan ini penting agar manajemen tidak hanya mengetahui jumlah total biaya, tetapi juga memahami jenis kegiatan yang menyerap anggaran dan kontribusinya terhadap pengelolaan lingkungan.

Pengakuan biaya lingkungan

Penelitian menunjukkan bahwa biaya penanganan, transportasi, dan pengolahan limbah telah diakui sebagai bagian dari pengeluaran operasional rumah sakit. Pengeluaran tersebut muncul seiring pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah dan jasa pengolahan yang dilakukan melalui pihak ketiga. Keberadaan alokasi biaya setiap tahun menunjukkan bahwa pengelolaan limbah telah diperhitungkan dalam kebutuhan anggaran operasional.

Pengakuan biaya lingkungan merupakan proses menentukan bahwa suatu pengeluaran berkaitan dengan aktivitas pengelolaan atau pengendalian dampak lingkungan. Hansen dan Mowen (2009) menjelaskan bahwa informasi biaya lingkungan diperlukan untuk membantu manajemen mengidentifikasi konsekuensi ekonomi dari aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, pengakuan biaya yang konsisten dapat membantu rumah sakit memastikan bahwa

pengeluaran terkait limbah B3 dapat ditelusuri melalui dokumen anggaran dan transaksi.

Meskipun biaya telah diakui, penggabungannya ke dalam kelompok biaya operasional umum menyebabkan informasi lingkungan belum sepenuhnya terlihat secara terpisah. Dengan demikian, tantangan penerapan akuntansi lingkungan bukan semata-mata terletak pada keberadaan pengeluaran, melainkan juga pada cara pengeluaran tersebut diklasifikasikan dan disajikan. Rumah sakit perlu memastikan bahwa biaya pengelolaan limbah dapat ditelusuri tanpa mengganggu sistem pelaporan keuangan yang berlaku.

Pengukuran biaya lingkungan

Pengukuran biaya lingkungan dilakukan menggunakan satuan moneter berupa rupiah. Komponen yang diukur dalam penelitian ini meliputi biaya penanganan, transportasi, dan pengolahan limbah. Berdasarkan data pada Tabel 1, total pengeluaran untuk pengelolaan limbah B3 selama 2022–2024 mencapai Rp3.118.286.000. Biaya pengolahan menyumbang komponen terbesar, yakni Rp1.866.295.000, diikuti biaya penanganan sebesar Rp787.873.100 dan biaya transportasi sebesar Rp464.117.900.

Dominannya biaya pengolahan menunjukkan bahwa tahap tersebut menyerap bagian terbesar dari anggaran pengelolaan limbah B3. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi manajemen untuk menelaah rincian kontrak jasa pengolahan, volume limbah yang diserahkan, dan bukti transaksi yang mendukung pengeluaran. Namun, besarnya biaya pengolahan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pemborosan karena pengolahan limbah B3 memerlukan penanganan yang sesuai dengan karakteristik dan persyaratan keselamatan limbah.

Hansen dan Mowen (2009) menempatkan informasi biaya lingkungan sebagai salah satu dasar untuk mengevaluasi dan mengendalikan biaya yang berkaitan dengan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, pengukuran biaya sebaiknya tidak berhenti pada pencatatan nilai rupiah secara agregat. Rumah sakit juga perlu menghubungkan biaya dengan jenis kegiatan, volume limbah, periode pengeluaran, dan dokumen pendukung. Informasi yang lebih rinci akan membantu manajemen membandingkan perubahan biaya antarperiode dan mengidentifikasi bagian pengelolaan yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut.

Penyajian biaya lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pengelolaan limbah telah dicatat dalam sistem keuangan rumah sakit, tetapi belum disajikan secara khusus dalam laporan biaya lingkungan yang terpisah dari biaya operasional lainnya. Akibatnya, informasi mengenai biaya lingkungan belum dapat diidentifikasi secara langsung melalui laporan keuangan umum. Kondisi ini membatasi kemampuan pengguna

laporan untuk mengetahui secara terperinci besarnya pengeluaran yang secara khusus berkaitan dengan pengelolaan limbah B3.

Penyajian informasi merupakan tahap penting karena menentukan sejauh mana data biaya dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Apabila biaya lingkungan tercampur dengan biaya operasional lain, manajemen perlu melakukan penelusuran tambahan untuk mengetahui total pengeluaran dan komponen biaya yang relevan. Situasi tersebut dapat menyulitkan evaluasi efisiensi biaya lingkungan dan perencanaan anggaran pada periode selanjutnya.

Temuan ini mengindikasikan bahwa penyajian biaya lingkungan di RSUD Raden Mattaher masih perlu dikembangkan. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan ialah penggunaan kode akun atau subakun internal untuk mengelompokkan biaya penanganan, transportasi, pengolahan, pencegahan, dan pemantauan lingkungan. Pengelompokan tersebut dapat disesuaikan dengan sistem akuntansi rumah sakit dan ketentuan pelaporan yang berlaku. Tujuannya bukan sekadar membuat laporan tambahan, melainkan meningkatkan keterlacakan transaksi serta memudahkan evaluasi pengeluaran lingkungan.

Pengungkapan biaya lingkungan

Pengungkapan biaya lingkungan di RSUD Raden Mattaher dilakukan melalui laporan penggunaan anggaran dan laporan operasional rumah sakit. Akan tetapi, berdasarkan temuan dalam skripsi, informasi tersebut masih bersifat umum dan belum disajikan sebagai laporan lingkungan yang terpisah. Rumah sakit juga belum mengungkapkan biaya secara terperinci berdasarkan klasifikasi biaya pencegahan, deteksi, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal sebagaimana kerangka biaya kualitas lingkungan yang dijelaskan Hansen dan Mowen (2009).

Keterbatasan pengungkapan berimplikasi pada transparansi informasi. Informasi berupa total biaya memang memberikan gambaran tentang besarnya sumber daya yang dikeluarkan, tetapi belum cukup untuk menjelaskan tujuan masing-masing pengeluaran dan kaitannya dengan pengendalian dampak lingkungan. Bagi manajemen, rincian tersebut diperlukan untuk mengevaluasi prioritas anggaran. Bagi pemangku kepentingan, pengungkapan yang memadai dapat memperjelas bentuk tanggung jawab rumah sakit dalam mengelola dampak lingkungan dari kegiatan pelayanan kesehatan.

Gray et al. (1996) menempatkan pelaporan sosial dan lingkungan sebagai bagian dari pertanggungjawaban organisasi kepada pemangku kepentingan. Berdasarkan perspektif tersebut, pengungkapan biaya lingkungan dapat dipahami sebagai sarana untuk memperkuat akuntabilitas, sepanjang informasi yang disampaikan relevan, dapat ditelusuri, dan didukung bukti. Oleh karena itu, rumah sakit perlu mempertimbangkan penyajian informasi biaya lingkungan yang lebih sistematis, baik untuk kebutuhan evaluasi internal maupun untuk pelaporan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan akuntansi lingkungan di RSUD Raden Mattaher telah terlihat pada aspek identifikasi, pengakuan, dan pengukuran biaya lingkungan. Namun, aspek penyajian dan pengungkapan belum optimal karena biaya pengelolaan limbah masih tergabung dalam biaya operasional umum dan belum dijelaskan secara terperinci menurut klasifikasi biaya lingkungan. Dengan demikian, penerapan akuntansi lingkungan dapat dinilai telah berjalan secara parsial: aktivitas dan pengeluaran lingkungan telah dikenali, tetapi sistem penyajian serta pengungkapannya masih memerlukan penguatan.

Pengelolaan Limbah B3 sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah B3 merupakan bagian dari tanggung jawab RSUD Raden Mattaher terhadap kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Kegiatan pemilahan, penyimpanan sementara, pengangkutan, dan pengolahan limbah mencerminkan upaya rumah sakit untuk menangani limbah yang timbul dari aktivitas pelayanan kesehatan. Kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pengangkutan dan pengolahan juga menjadi bagian dari mekanisme pengelolaan yang diterapkan rumah sakit.

Pertanggungjawaban sosial dalam konteks rumah sakit tidak hanya berkaitan dengan penyediaan pelayanan kesehatan, tetapi juga dengan pengendalian dampak yang dihasilkan oleh kegiatan operasional. Limbah B3 yang tidak ditangani dengan tepat berpotensi menimbulkan risiko bagi petugas, pasien, masyarakat, dan lingkungan. Karena itu, pengelolaan limbah yang terencana merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi untuk mengurangi risiko tersebut. Dalam perspektif Gray et al. (1996), akuntabilitas sosial dan lingkungan berkaitan dengan kewajiban organisasi untuk menjelaskan dampak aktivitasnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Keterkaitan antara akuntansi lingkungan dan pertanggungjawaban sosial terlihat melalui pencatatan pengeluaran untuk penanganan limbah serta upaya menyediakan informasi mengenai penggunaan anggaran. Pencatatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan limbah memerlukan dukungan sumber daya yang nyata. Namun, tanggung jawab sosial tidak cukup dinilai dari besarnya biaya yang dikeluarkan. Penilaian yang lebih utuh perlu mempertimbangkan kesesuaian prosedur, keterlacakan dokumen, efektivitas pengelolaan, kepatuhan terhadap peraturan, serta transparansi pelaporan.

Dengan demikian, praktik pengelolaan limbah B3 di RSUD Raden Mattaher dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Meskipun demikian, penguatan sistem akuntansi lingkungan tetap diperlukan agar tanggung jawab tersebut tidak hanya terlihat pada aktivitas pengelolaan limbah, tetapi juga tercermin dalam informasi biaya yang lebih transparan dan dapat dievaluasi. Pemisahan biaya lingkungan dan pengungkapan yang memadai berpotensi membantu manajemen menunjukkan bagaimana sumber daya digunakan untuk mendukung pengelolaan lingkungan.

Kendala Penerapan Akuntansi Lingkungan

Penelitian mengidentifikasi beberapa kendala dalam penerapan akuntansi lingkungan di RSUD Raden Mattaher. Kendala pertama adalah belum tersedianya sistem pencatatan biaya lingkungan yang terpisah dari biaya operasional umum. Biaya penanganan, transportasi, dan pengolahan limbah masih dicatat dalam kelompok biaya operasional sehingga diperlukan penelusuran tambahan untuk mengetahui jumlah biaya lingkungan secara spesifik. Kondisi tersebut menyulitkan evaluasi terhadap perubahan biaya dan efektivitas alokasi anggaran lingkungan.

Kendala kedua berkaitan dengan besarnya biaya pengelolaan limbah B3. Total pengeluaran sebesar Rp3.118.286.000 selama 2022–2024 menunjukkan bahwa pengelolaan limbah memerlukan alokasi sumber daya yang signifikan. Pada saat yang sama, rumah sakit perlu membiayai berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan lainnya. Oleh sebab itu, manajemen membutuhkan informasi biaya yang akurat agar perencanaan anggaran dapat dilakukan secara terukur tanpa mengabaikan keselamatan dan persyaratan pengelolaan limbah.

Kendala ketiga adalah keterbatasan fasilitas pendukung dan perlunya peningkatan kesadaran tenaga medis dalam pemilahan limbah. Pemilahan yang tidak tepat dapat memengaruhi proses penanganan berikutnya dan menyulitkan pengelolaan limbah sesuai karakteristiknya. Karena itu, penguatan sarana, sosialisasi, serta pelatihan bagi petugas yang terlibat dalam pengelolaan limbah menjadi bagian penting dari upaya perbaikan. Selain itu, ketergantungan pada pihak ketiga untuk pengangkutan dan pengolahan menuntut rumah sakit memastikan bahwa kerja sama, jadwal pengangkutan, dokumen serah terima, dan layanan pengolahan dapat ditelusuri dengan baik.

Kendala berikutnya berkaitan dengan keterbatasan klasifikasi dan pengungkapan biaya lingkungan. Ketika informasi biaya belum dipisahkan menurut jenis dan tujuan pengeluaran, rumah sakit akan lebih sulit membandingkan biaya antarperiode atau mengevaluasi kontribusi masing-masing kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan. Hansen dan Mowen (2009) menjelaskan bahwa klasifikasi biaya kualitas lingkungan dapat membantu organisasi membedakan pengeluaran untuk pencegahan, deteksi, dan penanganan kegagalan lingkungan. Kerangka tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat analisis internal, dengan tetap menyesuaikannya pada karakteristik pengeluaran rumah sakit.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan penerapan akuntansi lingkungan perlu dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, mengembangkan kode akun atau subakun untuk biaya pengelolaan limbah B3. Kedua, memastikan setiap transaksi didukung bukti dan dikaitkan dengan jenis kegiatan yang sesuai. Ketiga, menyusun rekapitulasi biaya lingkungan secara berkala untuk memudahkan evaluasi antarperiode. Keempat, meningkatkan koordinasi antara bagian keuangan dan pengelola limbah agar data volume, dokumen pengangkutan, serta tagihan pengolahan dapat dicocokkan. Kelima, meningkatkan kapasitas petugas melalui

pelatihan pencatatan biaya dan pengelolaan limbah. Langkah-langkah tersebut merupakan rekomendasi analitis berdasarkan kendala yang ditemukan, bukan pernyataan bahwa seluruh langkah telah diterapkan oleh rumah sakit.

Sintesis Hasil dan Implikasi Penelitian

Berdasarkan keseluruhan temuan, penerapan akuntansi lingkungan pada pengelolaan limbah B3 di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi telah didukung oleh identifikasi aktivitas pengelolaan limbah dan pengeluaran yang berkaitan dengannya. Rumah sakit telah mengalokasikan biaya untuk penanganan, transportasi, dan pengolahan limbah serta melaksanakan tahapan pengelolaan limbah B3. Namun, penggabungan biaya lingkungan ke dalam biaya operasional umum menyebabkan informasi biaya belum disajikan dan diungkapkan secara khusus.

Temuan tersebut menegaskan bahwa keberadaan pengeluaran lingkungan belum secara otomatis menghasilkan sistem akuntansi lingkungan yang komprehensif. Sistem yang memadai membutuhkan keterhubungan antara identifikasi aktivitas, pengakuan transaksi, pengukuran biaya, klasifikasi, penyajian, dan pengungkapan. Jika hubungan tersebut belum dibangun secara terstruktur, informasi biaya yang tersedia berpotensi belum optimal untuk mendukung evaluasi manajemen dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya penguatan pencatatan dan pelaporan biaya lingkungan yang tetap selaras dengan sistem keuangan rumah sakit. Penyusunan laporan biaya lingkungan secara internal, pemisahan kode akun, serta rekonsiliasi antara catatan keuangan dan dokumen pengelolaan limbah dapat membantu meningkatkan keterlacakan pengeluaran. Sementara itu, pengungkapan informasi yang relevan dapat memperkuat akuntabilitas rumah sakit terhadap pengelolaan dampak lingkungan dari kegiatan pelayanan kesehatan.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penelaahan penerapan akuntansi lingkungan dalam konteks pengelolaan limbah B3 di rumah sakit pemerintah, dengan menghubungkan informasi biaya, praktik pengelolaan limbah, dan pertanggungjawaban sosial. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa evaluasi akuntansi lingkungan perlu memperhatikan dua sisi sekaligus, yaitu pelaksanaan pengelolaan limbah secara operasional dan kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan. Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan limbah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban teknis, tetapi juga sebagai aktivitas yang membutuhkan pencatatan, pengendalian, dan pertanggungjawaban keuangan secara memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi telah terlihat melalui identifikasi aktivitas pengelolaan limbah serta

pengalokasian biaya penanganan, transportasi, dan pengolahan. Selama periode 2022–2024, total biaya pengelolaan limbah B3 berdasarkan data yang dianalisis mencapai Rp3.118.286.000. Biaya tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan limbah merupakan bagian penting dari kebutuhan operasional rumah sakit yang memerlukan perencanaan, pencatatan, dan pengendalian secara sistematis.

Meskipun demikian, penerapan akuntansi lingkungan belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek penyajian dan pengungkapan biaya. Biaya pengelolaan limbah masih tergabung dalam biaya operasional umum sehingga informasi mengenai pengeluaran lingkungan belum tersaji secara terpisah dan terperinci. Kondisi tersebut dapat membatasi kemudahan manajemen dalam mengevaluasi komponen biaya, membandingkan pengeluaran antarperiode, serta menilai efektivitas alokasi anggaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pencatatan melalui pengelompokan akun biaya lingkungan, dokumentasi transaksi yang memadai, dan penyusunan rekapitulasi biaya pengelolaan limbah secara berkala.

Pengelolaan limbah B3 juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban sosial dan lingkungan rumah sakit karena berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan pencemaran. Namun, pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dinilai dari besarnya biaya yang dikeluarkan, melainkan juga perlu memperhatikan ketepatan prosedur pengelolaan, keterlacakan dokumen, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan transparansi informasi. Dengan demikian, penguatan akuntansi lingkungan diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan manajerial sekaligus meningkatkan akuntabilitas rumah sakit dalam pengelolaan lingkungan.

Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi rumah sakit untuk mengintegrasikan informasi biaya lingkungan secara lebih terstruktur ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan internal. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas kajian melalui perbandingan dengan rumah sakit lain serta mengkaji hubungan antara biaya lingkungan, volume limbah, kepatuhan pengelolaan, dan efektivitas pengendalian lingkungan. Dengan demikian, penerapan akuntansi lingkungan dapat dikembangkan bukan hanya sebagai mekanisme pencatatan pengeluaran, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi dan pertanggungjawaban sosial yang lebih transparan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Bebbington, J. (1997). Engagement, education and sustainability: A review essay on environmental accounting. *Accounting, Auditing & Accountability Journal, 10*(3), 365–381. https://doi.org/10.1108/09513579710178115

Bastian, I. (2008). *Akuntansi kesehatan*. Erlangga.

Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone.

Gasperz, J., & Kriswantini, D. (2021). Mengungkap penerapan akuntansi lingkungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ambon. *Jurnal Akuntansi, 7*(1), 1–16. https://doi.org/10.30598/jak.7.1.1-16

Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (1996). *Accounting and accountability: Changes and challenges in corporate social and environmental reporting*. Prentice Hall.

Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2009). *Cost management: Accounting and control* (6th ed.). South-Western Cengage Learning.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar akuntansi keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikhsan, A. (2008). *Akuntansi lingkungan dan pengungkapannya*. Graha Ilmu.

Ikhsan, A. (2009). *Akuntansi manajemen lingkungan*. Graha Ilmu.

Indrawati, N. M., & Intan Saputra Rini, I. G. A. (2018). Analisis penerapan akuntansi lingkungan pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Tabanan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 9*(2), 85–95. https://doi.org/10.22225/kr.9.2.2018.85-95

International Federation of Accountants. (2005). *International guidance document: Environmental management accounting*. IFAC.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan*.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.